

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada Bab IV ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dipaparkan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Implementasi Kebijakan Hutan Rakyat dan menggunakan metode implementasi Riant Nugroho dengan enam variabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Permenlhk No. P.85 /Menlhk /2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Berasal dari Hutan Hak dan Permenlhk No : P.49/MenLHK /2016 Tentang Bantuan Bibit Rakyat tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut ;

1. Standard dan sasaran kebijakan

Kejelasan standard dan sasaran kebijakan tertuang di Permenlhk No. P.85 /Menlhk /2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Berasal dari Hutan Hak dan Permenlhk No : P.49/MenLHK/2016 Tentang Bantuan Kebun Bibit Rakyat. Pada kenyataannya arah tujuan khususnya peraturan penerbitan nota angkut mendapat respon kurang baik dari UMHR Wonolestari, karena UMHR Wonolestari merasa kehilangan sistem kontrol penjualan hasil hutan

kayu yang berada di wilayah kerja Wonolestari. Hal tersebut juga dapat menyebabkan berkurangnya kelestarian hutan rakyat.

## 2. Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya meliputi staff, fasilitas dan dana. Untuk staff khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari segi kuantitas sangatlah kurang maka diperlukannya rekrutmen penyuluh kehutanan. Dari segi fasilitas UMHR Wonolestari memiliki sekertariat yang digunakan sebagai penyimpanan berkas administratif organisasi.

## 3. Karakteristik organisasi pelaksana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memiliki Struktur Birokrasi yang baik, namun tidak terdapatnya bidang yang khusus mengurus masalah Hutan Rakyat hal ini menyebabkan kewenangan Dinas LHK terhadap Hutan Rakyat sangat kecil, walaupun terdapat Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan.

Struktur Birokrasi UMHR Wonolestari sangat baik karena berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan serta menjadikan Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembina.

## 4. Komunikasi antar organisasi pelaksana

Komunikasi terkait peraturan-peraturan tentang hutan rakyat tidak tersampaikan dengan baik kepada staf di Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dikarenakan kurangnya koordinasi antar bidang dan peraturan tidak ditransmisikan secara jelas

#### 5. Disposisi

Sikap pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi pemahaman tentang Permenlhk No. P.85 /Menlhk / 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Berasal dari Hutan Hak dan Permenlhk No : P.49/MenLHK/ 2015 Tentang Kebun Bibit Rakyat masih belum memahami secara keseluruhan serta masih menggunakan peraturan yang tidak berlaku. Namun penyuluh dan Koordinator UMHR Wonolestari dapat memahami peraturan dengan baik sehingga program bantuan bibit tetap berjalan walaupun bantuan bibit non kayu belum dirasakan cukup oleh masyarakat.

#### 6. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal yang merasakan dampak dari kebijakan atau program program hutan rakyat dibagi kedalam tiga sector dan dimasing masing sector mendapat manfaat dari implementasi kebijakan hutan rakyat karena UMHR Wonolestari terdaftar sebagai Pengelola Hutan Bersama Masyarakat Lestari. Walaupun sektor ekologi dan ekonomi masih kurang begitu kondusif dikarenakan adanya tumpang tindih kebijakan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya ditemukan berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan hutan rakyat, khususnya dalam penerapan Permenlhk No. P.85 /Menlhk /Setjen/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Berasal dari Hutan Hak dan Permenlhk No : P.49/MenLHK/ 2016 Tentang Kebun Bibit Rakyat di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

Maka penulis memberikan saran dalam bentuk rekomendasi hasil penelitian yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepada Unit Manajemen Hutan Rakyat Wonolestari sebagai berikut :

1. Diperlukannya bantuan bibit non kayu untuk membantu meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus ekologi Kelompok Tani Hutan Rakyat.
2. Perlu adanya rekrutmen anggota tim penyuluh di Dinas LHK supaya dapat membantu dalam sosialisasi kebijakan atau program-program tentang kehutanan berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya bantuan pemasaran hasil hutan rakyat oleh pemerintah supaya meningkatkan ekonomi pengelola hutan rakyat..
4. Diperlukannya pembuatan kebijakan di tingkat daerah untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan.